

Dasar-dasar dari Kegiatan Penanaman Modal ADB

Bagaimana ADB bekerja?

ADB memberikan bantuan keuangan, melalui hibah dan pinjaman jangka panjang berbunga rendah, dan saran-saran profesional untuk kegiatan-kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi bagi negara-negara berkembang dan dalam masa transisi di wilayah Asia-Pasifik. Layanan-layanan tersebut ini diberikan kepada pemerintah-pemerintah negara dan juga perusahaan-perusahaan swasta, tapi tidak kepada perorangan.

Berikut ini adalah jenis-jenis bantuan keuangan yang ditawarkan ADB kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggota (DMCs):

Sumber-sumber Modal Umum (*Ordinary Capital Resources* - OCR): Hampir 75% dari pinjaman ADB berasal dari OCR. Pinjaman OCR biasanya berjangka waktu 15-25 tahun, mempunyai suku bunga yang ditentukan oleh pasar dan dibuat untuk DMCs yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.

Dana Pembangunan Asia (*Asian Development Fund* - ADF): Dana khusus ini dimulai pada tahun 1973 sebagai sebuah instrumen dari pinjaman ringan untuk anggota-anggota berpendapatan rendah. Pinjaman proyek ADF memberikan waktu yang lebih lama bagi para peminjam untuk membayar kembali pinjaman mereka (ADF mempunyai periode jatuh tempo 32 tahun¹, termasuk 8 tahun masa kelonggaran di mana peminjam tidak diharuskan untuk membayar bunga apapun), dan beban bunga yang sangat rendah (1 % - 1,5 %). Hanya negara-negara anggota termiskin yang bisa mendapatkan pinjaman jenis ini. Beberapa negara menerima gabungan dari pinjaman OCR dan ADF.

Uang dari ADF diterima melalui janji pemberian sumbangan (mencakup periode 4 tahun) baik dari negara-negara anggota yang menjadi donor dari regional dan non-regional. Siklus sumbangan disebut “Penambahan (*Replenishments*)” dan ditentukan setelah negosiasi antara negara-negara donor dan ADB. Negosiasi tersebut berfokus pada jumlah yang akan disumbangkan dari tiap negara donor dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh para donor sebagai pertukaran dari sumbangan mereka. Saat ini pinjaman ADF dalam penambahannya yang ke-9 (mencakup periode Januari 2005 – Desember 2008) mencapai 27% dari keseluruhan bantuan ADB, dan ada 24 negara yang menerimanya bantuan tersebut.

Bagaimana para peminjam menggunakan dana ADB?

ADB memberikan pinjaman dan hibah untuk DMCs untuk mendukung kegiatan pembangunan mereka. Suku bunga dari pinjaman-pinjaman tersebut lebih rendah dari yang ditawarkan bank-bank komersial. Untuk semua pinjaman, ADB memberikan sebagian dari pendanaan dan peminjam juga harus menyediakan pendanaan tambahan. Bagian ADB bisa jadi, dan seringkali, pada dasarnya lebih besar dari bagian negara peminjam.

Hal yang penting untuk dicatat adalah para peminjam harus selalu membayar kembali pinjaman ADB, dengan bunga, terlepas apakah proyek atau program tersebut sukses dalam mencapai tujuannya atau tidak. Beban ini sudah pasti harus dibayar oleh warga negara dari negara tersebut. (lihat di bawah)

Pinjaman berdasarkan sektor	USD (juta)	Persentase dari pinjaman tahunan
Pertanian dan Sumber daya alam	391,90	6,4
Energi	756,70	12,4
Keuangan	483,00	7,9
Industri dan Mineral bukan bahan bakar	0,0	0,0
Infrastruktur sosial	1.130,51	18,5
Transportasi dan komunikasi	2.577,70	42,2
Multisektor	465,5	7,6
Lain-lain	299,5	4,9
Total	6.104,81	100,0

Organisasi-organisasi yang mengawasi kegiatan-kegiatan ADB sering menemukan adanya proyek-proyek dan program-program yang tidak berhasil sehingga tidak dapat membantu pencapaian misi keseluruhan ADB untuk mengurangi kemiskinan di wilayah Asia-Pasifik. Penting untuk dicatat bahkan Departemen Evaluasi Kegiatan (OED) dari ADB sendiri mengakui bahwa banyak dari proyek-proyek ADB tidak berhasil atau hanya berhasil sebagian.

Pinjaman untuk proyek-proyek sektor publik: Fokus utama ADB selama ini adalah untuk menyediakan dana publik untuk proyek-proyek – khususnya proyek-proyek infrastruktur besar- dalam energi, transportasi, komunikasi dan pertanian. Contohnya termasuk pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, bendungan pembangkit listrik tenaga air, fasilitas penyaluran listrik, proyek-proyek minyak dan gas, dan program-program irigasi. Jenis-jenis proyek tersebut umumnya sangatlah mungkin untuk menghasilkan dampak-dampak yang besar terhadap lingkungan dan komunitas-komunitas yang tinggal di wilayah proyek tersebut.

Pinjaman program: Sejak 1990-an ADB juga telah memberikan pinjaman-pinjaman program.

Dalam pinjaman program ke sektor-sektor, pemerintah peminjam diberikan sejumlah pinjaman (lump sum) yang bertujuan untuk membantu pemerintah tersebut melaksanakan reformasi kebijakan dalam sektor tertentu, seperti air atau tenaga listrik, di mana kebijakan tersebut dimaksudkan

untuk memastikan bahwa sektor tersebut dikelola dengan lebih efisien. Melalui pinjaman-pinjaman tersebut ADB mampu mendorong ideologi liberalisasi pasarnya. Umumnya, reformasi semacam itu telah membuka jalan untuk keterlibatan dan pengelolaan sektor swasta yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang awalnya dijalankan oleh pemerintah pusat.

Peminjam terbesar, 2003 (Juta \$)

India	1.532
Cina, Republik Rakyat	1.488
Pakistan	871
Bangladesh	532
Sri Lanka	275
Indonesia	262
Filipina	184
Vietnam	179
Afghanistan	150
Uzbekistan	99
DMCs lainnya	488
Regional	45
Total miliar	\$6,1

(sumber: Laporan tahunan ADB 2003)

Pinjaman berdasarkan sektor, 2003 (persen)	
Transpor dan komunikasi	41
Infrastruktur sosial	19
Energi	11
Keuangan	8
Multisektor	8
Pertanian dan Sumber daya alam	6
Industri dan mineral-mineral bukan bahan bakar	0
Lainnya	5
Total	\$6,1 miliar

(sumber: Laporan tahunan ADB 2003)

Pinjaman-pinjaman untuk proyek-proyek sektor swasta: ADB memberikan persentase yang kecil, tapi terus meningkat, dari pinjamannya untuk perusahaan-perusahaan swasta yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di DMC. Pinjaman saat ini disediakan untuk proyek-proyek sektor keuangan dan infrastruktur. Pada 2003, ADB menyetujui 562,7 USD untuk kegiatan-kegiatan sektor swasta. Terjadi kenaikan 174% dari bantuan yang diberikan pada tahun sebelumnya.

Penerima Bantuan Teknis Terbesar, 2003 (Juta \$)	
India	15
Cina, Republik Rakyat	14
Indonesia	11
Afghanistan	11
Pakistan	10
Vietnam	9
Kamboja	6
Sri Lanka	5
Bangladesh	5
Filipina	4
DMCs lainnya	54
Regional	51

(sumber: Laporan tahunan ADB 2003)

Bantuan Teknis (Technical Assistance - TA): ADB memberikan hibah dan/atau pinjaman bantuan teknis kepada DMCs untuk identifikasi dan persiapan dari sebuah proyek atau program. Bantuan teknis diberikan melalui beberapa kategori berikut ini:

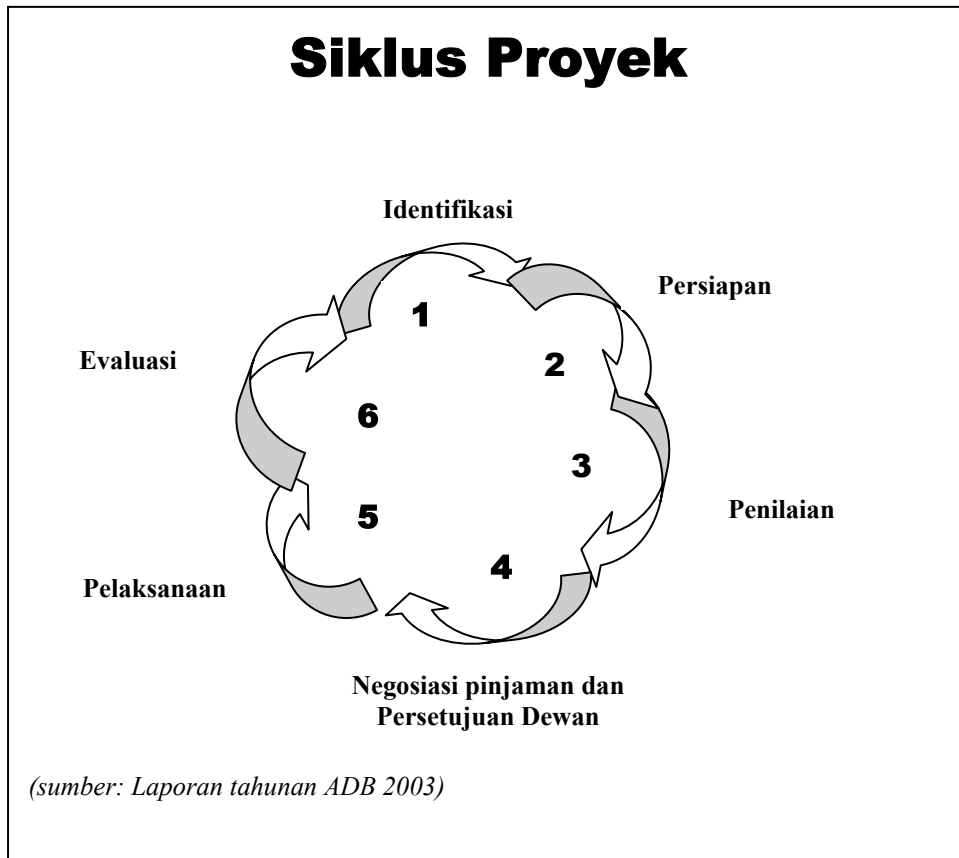
- *Bantuan teknis persiapan proyek* – untuk persiapan atau kajian kelayakan dan penilaian lainnya
- *Bantuan teknis pelaksanaan proyek* – mencakup jasa konsultasi untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan awal, termasuk pelatihan dari personel proyek
- *Bantuan teknis penasehat* – untuk penguatan kelembagaan, kajian-kajian kebijakan dan sektor, kegiatan non proyek yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia (HRD)
- *Bantuan teknis regional* – untuk menanggapi isu-isu kepentingan dari wilayah dan sub-wilayah

Seperti kegiatan-kegiatan ADB lainnya, komunitas-komunitas yang terkena dampak dan stakeholder eksternal lainnya harus dilibatkan dalam pengembangan, persiapan dan pelaksanaan TA

Siklus Proyek

Untuk memahami bagaimana ADB berfungsi dan bagaimana masyarakat sipil dapat mempengaruhi kegiatannya seseorang harus memahami bagaimana ADB memulai dan menyiapkan proyek-proyeknya. Beragam langkah dari identifikasi hingga penyelesaian proyek secara kolektif dikenal sebagai siklus proyek ADB. Pada bermacam tahap dari siklus proyek ada kesempatan-kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi mengenai proyek tertentu, dan untuk menggunakan pengaruh terhadap bagaimana atau apakah proyek tersebut dikembangkan. Deskripsi siklus proyek dibawah menjelaskan informasi apa yang tersedia pada tiap tahap, ² dan menyarankan aksi-aksi yang dapat dilakukan masyarakat sipil untuk dapat mengetahui lebih jauh, atau untuk mempengaruhi hasil dari sebuah proyek. Umumnya lebih mudah untuk mempengaruhi keputusan-keputusan ADB terhadap sebuah proyek pada tahap-

tahap awal dari siklus proyek tersebut. Setelah pembuatan proyek tersebut dimulai akan sangat sulit untuk mempengaruhi perubahan-perubahan pada desain proyek tersebut, dan lebih dari itu sulit untuk melobby agar proyek itu diberhentikan sama sekali.



Tahap 1: Identifikasi Proyek

Selama tahap ini, ADB mengkonsultasikan dengan tingkat eksekutif (misalnya kementerian) dari pemerintah peminjam untuk mengidentifikasi program-program dan proyek-proyek potensial. Semua ide program dan proyek harus konsisten dengan tujuan pembangunan yang teridentifikasi dalam Strategi dan Program Negara (*Country Strategy and Program - CSP*) untuk negara tersebut.

ADB juga dapat mengirimkan misi pencarian fakta untuk mendapatkan informasi di lapangan jika ADB berencana untuk menyediakan sebuah Bantuan Teknis Persiapan Proyek (PPTA) untuk proyek tersebut.

Informasi apa yang tersedia: Selama tahap identifikasi proyek, informasi mengenai sebuah proyek yang diajukan akan tersedia pada situs “Kesempatan Bisnis (*Business Opportunities*)” ADB di <http://www.adb.org/Projects>. Organisasi masyarakat sipil harus memperhatikan dengan cermat terhadap PPTA yang diajukan, karena jika ADB bersedia menyediakan pinjaman untuk proyek yang ia dukung melalui bentuk bantuan teknis semacam itu, maka itu adalah sebuah bentuk informasi terbaru paling awal yang diberikan mengenai proyek potensial yang akan didanai ADB. Organisasi masyarakat sipil harus melihat pada dua daftar yaitu daftar dari proyek-proyek dan PPTA yang diajukan dan juga yang dipindahkan karena daftar yang kedua menjelaskan mengapa sebuah proyek tidak

lagi berada di bagian pengajuan; seringkali karena proyek/TA tersebut telah disetujui dan sedang dalam tahap pelaksanaan.

Informasi mengenai proyek-proyek dan bantuan teknis yang diajukan juga tersedia secara online dalam bentuk Profil Proyek (*Project Profile*), yang memberikan ringkasan singkat sepanjang 1 – 2 halaman dari proyek tersebut. Profil Proyek dapat dilihat pada <http://www.adb.org/Projects/profiles.asp>. Informasi mengenai proyek-proyek potensial juga dapat ditemukan dalam lampiran dari CSP negara dan update CSP, yang juga tersedia di situs ADB <http://www.adb.org/Documents/CSPs>. Satu dari lampiran tersebut berisi makalah-makalah konsep untuk proyek-proyek yang diajukan di mana pemerintah DMC telah mendiskusikannya dengan ADB.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil: Situs kesempatan bisnis mendaftar petugas proyek yang bertanggungjawab terhadap proyek atau bantuan teknis dan memberikan informasi mengenai informasi kontak dari orang tersebut. Jika anda ingin mempelajari lebih jauh mengenai proyek tersebut, atau jika anda mempunyai kekhawatiran terhadap suatu proyek, anda dapat mengirim surat atau menelepon orang tersebut. Jika petugas proyek tersebut tidak responsif anda dapat menghubungi Direktur Jenderal dari departemen regional yang menangani negara anda. Anda juga dapat menghubungi Kantor Hubungan Eksternal (*Office of External Relations - OER*) setiap saat anda mempunyai kesulitan untuk mendapatkan respon. OER bertanggungjawab untuk memastikan bahwa permintaan-permintaan anda untuk mendapatkan informasi ditanggapi secara memuaskan. Informasi kontak untuk departemen regional dan OER dapat dilihat di lampiran III.

Sebagai tambahan, untuk mendapatkan informasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap sebuah proyek atau bantuan teknis, dalam profil proyek juga terdapat informasi kontak untuk perwakilan dari badan pelaksana proyek yang ada di pemerintah peminjam. Masyarakat sipil dapat menggunakan informasi ini untuk menghubungi badan pelaksana proyek untuk

mendapatkan informasi mengenai proyek tersebut, atau untuk menyatakan kekhawatiran.

Menurut kebijakan ADB, proses pengidentifikasian orang-orang yang menerima manfaat dan yang mungkin terkena dampak buruk sebuah proyek harus dimulai pada tahap awal dari identifikasi proyek. Kelompok masyarakat sipil dapat mencoba untuk berbicara dengan staf ADB di kantor lokal (*resident mission*) atau pada departemen regional yang relevan pada markas ADB untuk mendapatkan pandangan mengenai proyek-proyek apa yang sedang diajukan di negara mereka.

Tahap 2: Persiapan Proyek

Selama tahapan ini pemerintah peminjam, dengan bantuan dari staf ADB, melakukan persiapan teknis untuk sebuah proyek. Peminjam, dengan bantuan ADB, harus mengevaluasi dampak-dampak lingkungan dari proyek tersebut. Jika proyek tersebut berkemungkinan berakibat pada kerusakan yang parah dan tidak dapat diperbaiki pada lingkungan, peminjam harus mempersiapkan sebuah penilaian dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment - EIA*) yang mendokumentasikan resiko-resiko lingkungan dan bagaimana resiko tersebut akan ditanggapi. Jika dampak-dampak lingkungan diharapkan tidak akan menjadi begitu parah, peminjam harus mempersiapkan sebuah pemeriksaan lingkungan awal (*Initial Environmental Examination - IEE*) yang mendokumentasikan resiko-resiko lingkungan dan bagaimana resiko tersebut akan dikurangi, tapi dengan cara yang kurang komprehensif dibandingkan dengan EIA).

Peminjam, dengan dukungan ADB, juga harus mengevaluasi dampak-dampak sosial dari proyek tersebut dan mengidentifikasi siapa yang akan menerima manfaat, dan siapa yang mungkin akan terkena dampak buruk dari proyek tersebut. Hal tersebut juga termasuk mengevaluasi berapa banyak orang yang harus dipindahkan, apakah sumber mata pencaharian dari sebuah komunitas akan terkena dampak dari proyek tersebut, dan dampak spesifik yang dimiliki proyek

tersebut terhadap komunitas-komunitas yang rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, dan minoritas agama dan etnis. Informasi ini didokumentasikan pada penilaian sosial awal

(*Initial Social Assessment - ISA*) yang juga menggambarkan bagaimana masalah-masalah sosial akan ditanggapi.

Kategorisasi Lingkungan ADB

Proyek-proyek kategori "A": Proyek-proyek yang mempunyai dampak-dampak lingkungan yang parah dimasukkan dalam kategori "A". Diperlukan adanya sebuah EIA.

Proyek-proyek kategori "B": Proyek-proyek yang mempunyai beberapa dampak-dampak lingkungan yang buruk dimasukkan dalam kategori "B". Sebuah IEE diperlukan untuk menentukan apakah EIA juga perlu dilakukan. Jika tidak, maka IEE merupakan dokumen lingkungan yang final.

Proyek-proyek kategori "C": Proyek-proyek yang tidak mempunyai dampak-dampak lingkungan dimasukkan ke dalam kategori "C". Tidak diperlukan IEE atau EIA tapi pertimbangan-pertimbangan lingkungan tetap perlu ditinjau ulang.

Proyek-proyek kategori "F1": Proyek-proyek yang melibatkan mediator keuangan ataupun penanaman modal diklasifikasikan sebagai "F1". Mediator keuangan akan mengajukan sebuah sistem pengelolaan lingkungan jika dampak-dampak lingkungan diperkirakan ada.

(sumber: Seksi OM ADB F1/OP)

Tergantung pada sifat dari dampak-dampak tersebut, beberapa proyek kemungkinan mengharuskan peminjam untuk membuat sebuah rencana pemindahan., yang menjelaskan berapa banyak orang yang harus dipindahkan karena proyek itu, di mana mereka akan ditempatkan, dan penggantian apa yang akan mereka peroleh. Beberapa proyek mungkin membutuhkan sebuah rencana pengembangan masyarakat adat, yang menggambarkan efek-efek negatif dari proyek tersebut yang mungkin akan dirasakan para masyarakat adat, bagaimana efek-efek tersebut akan dikurangi atau dihindari, bagaimana masyarakat adat akan diberi penggantian, dan bagaimana proyek tersebut mempertimbangkan pilihan yang diinginkan atau dipilih oleh para masyarakat adat.

Meskipun peminjam bertanggungjawab terhadap pembuatan bermacam dokumen yang disebutkan di atas, ADB harus memastikan bahwa dokumen-dokumen itu konsisten dengan kebijakan-kebijakan ADB. Dalam banyak kasus ADB akan menyediakan bantuan langsung dalam bentuk PPTA untuk persiapan dari penilaian yang disebutkan di atas dan persiapan teknis

apapun yang diperlukan. Umumnya pemerintah peminjam akan menyewa konsultan-konsultan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut.

Informasi apa yang tersedia: Selama tahap persiapan peminjam harus memastikan tersedianya informasi mengenai dampak-dampak lingkungan dan sosial dari sebuah proyek, dan juga informasi mengenai bagaimana dampak-dampak tersebut akan dikurangi. ADB mengharuskan peminjam untuk membuat EIA, IEE dan rencana pemindahan tersedia atas permintaan komunitas-komunitas yang terkena dampak dan masyarakat sipil.

Sebagai tambahan, selama tahap persiapan proyek, ADB bertanggungjawab untuk memperbaharui profil proyek di dalam websitenya untuk mencerminkan perubahan-perubahan pada sebuah proyek.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil: Kebijakan-kebijakan ADB mengharuskan bahwa harus ada konsultasi dengan orang-orang yang akan terkena dampak oleh proyek tersebut saat dokumen-dokumen yang disebut diatas (EIA, IEE, ISA, rencana pemindahan, rencana masyarakat

adat) sedang dibuat. ADB juga mengharuskan proses pembangunan yang partisipatoris untuk semua tahap desain dan pelaksanaan proyek, karena itu ADB mewajibkan peminjam untuk menginformasikan komunitas-komunitas yang terkena dampak mengenai proyek dan memberikan mereka kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap proyek tersebut sedini mungkin. Organisasi masyarakat sipil dapat menghubungi badan pelaksana proyek dan ADB untuk mencari tahu status dari penilaian lingkungan dan sosial, dan bagaimana masukan mereka dapat diakomodasi dalam penilaian tersebut. Jika masyarakat sipil merasa bahwa sebuah dampak lingkungan dari sebuah proyek telah secara salah dikategorisasikan, mereka harus menginformasikan hal ini kepada ADB.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat membiasakan diri mereka dengan beberapa kebijakan-kebijakan kunci ADB yang menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah peminjam berhubungan dengan dampak lingkungan dan sosial, keterbukaan informasi dan partisipasi dari komunitas-komunitas yang terkena dampak, untuk menentukan jika pemerintah sudah mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh ADB. Toolkit tentang kerangka kebijakan dan mekanisme akuntabilitas ADB menggarisbawahi beberapa dari kebijakan kunci tersebut yang harus dikenali dan dipelajari oleh organisasi masyarakat sipil. Jika mereka menyakini pemerintah tidak mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut saat pemerintah mempersiapkan proyek tersebut, hal ini harus dikomunikasikan kepada ADB. Sebuah organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat kasusnya dengan menyebutkan secara spesifik kebijakan-kebijakan mana yang diyakini telah dilanggar, dan jika mungkin, mengutip seksi spesifik dari kebijakan yang tidak dipatuhi oleh pemerintah peminjam. Daftar lengkap dari kebijakan-kebijakan ADB dapat dilihat pada <http://www.adb.org/Development/policies.asp>

Tahap 3: Penilaian Proyek

Selama tahap penilaian ADB memeriksa ketercapaian proyek melalui misi-misi pencarian fakta dan penilaian. Saat misi-misi tersebut, ADB memeriksa aspek-aspek teknis, keuangan dan ekonomi proyek tersebut, dan

juga dampak-dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi. ADB bertanggung jawab untuk mengkaji seluruh aspek dari proyek tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut konsisten dengan kebijakan-kebijakan dan panduan-panduan ADB. Informasi yang dikumpulkan melalui misi-misi pencarian fakta dan penilaian digunakan staf ADB untuk membuat sebuah draft laporan dan rekomendasi Presiden (*Report and Recommendation of the President - RRP*) dan draft perjanjian pinjaman (*Loan Agreement - LA*)

Selama tahap penilaian, Staf ADB diwajibkan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang akan terkena dampak dari proyek tersebut.

Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil: Tahapan ini merupakan kesempatan terakhir bagi organisasi masyarakat sipil untuk bisa mempengaruhi desain sebuah proyek sebelum ADB memutuskan untuk mendanai sebuah proyek. Karena pada tahap ini ADB belum menandatangani sebuah perjanjian pinjaman dengan pemerintah peminjam, perubahan-perubahan pada desain proyek masih mungkin dilakukan. Sekali perjanjian pinjaman ditandatangani, surat tersebut menjadi kontrak resmi antara pemerintah peminjam dan ADB. Jika ADB merubah merubah rencananya berkaitan dengan proyek tersebut setelah penandatanganan perjanjian pinjaman, ini menunjukkan sebuah pelanggaran dalam perjanjian kontrak, ADB hanya akan melakukan hal ini jika terjadi situasi dan kondisi yang luar biasa.

Jika Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai kekhawatiran mengenai proyek tersebut mereka harus mengungkapkannya pada Direktur Jenderal dari departemen regional yang membawahi proyek tersebut. Mereka juga bisa mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada wakil presiden ADB yang relevan atau juga kepada presiden ADB. Informasi kontak untuk hal-hal diatas dapat dilihat di lampiran III. Organisasi Masyarakat Sipil juga dapat menghubungi ADB jika mereka ingin menjadwalkan sebuah pertemuan dengan staf ADB pada saat salah satu dari misi pencarian fakta dan penilaian dilakukan.

Seperti disebutkan pada tahap persiapan, Organisasi Masyarakat Sipil dapat mengutip kebijakan-kebijakan yang dilanggar oleh pemerintah peminjam untuk memperkuat kasus mereka. Jika Organisasi Masyarakat Sipil mendukung sebuah proyek, tapi merasa bahwa perlu adanya tanggapan yang lebih baik terhadap resiko-resiko lingkungan dan sosial tertentu, mereka dapat menginformasikan staf ADB untuk memasukkan persyaratan-persyaratan tertentu dalam draft RRP dan draft perjanjian pinjaman yang mereka yakini dapat mengurangi resiko-resiko tersebut.

Tahap 4: Negosiasi Pinjaman dan Persetujuan Dewan

Pada saat tahap ini draft perjanjian pinjaman yang disiapkan oleh staf ADB ditinjau kembali oleh perwakilan-perwakilan negara anggota berkembang yang menjadi anggota ADB, ADB dan kedua belah pihak memberikan masukan mereka. Setelah masukan-masukan itu dimasukkan ke dalam perjanjian pinjaman tersebut, pemerintah akan dipanggil untuk bernegosiasi dengan ADB.

Setelah negosiasi dengan pemerintah, RRP final diajukan kepada dewan direktur eksekutif ADB untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan dewan, dokumen tersebut dikirimkan kepada pemerintah negara peminjam untuk otorisasi. Setelah otorisasi, perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Presiden ADB dan perwakilan dari pemerintah. Perjanjian pinjaman ini merupakan kontrak resmi antara pemerintah peminjam dan ADB.

Informasi apa yang tersedia: RRP dan perjanjian pinjaman akan tersedia untuk umum setelah persetujuan dewan.

Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil: Pada tahap ini, kekhawatiran mengenai sebuah proyek harus dikomunikasikan langsung kepada Dewan. Penting bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengkomunikasikan kekhawatirannya sebelum Dewan bertemu untuk mendiskusikan proyek tersebut.

Jika Dewan menyetujui sebuah proyek dan organisasi masyarakat sipil masih mengkhawatirkan mengenai dampak-dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut,

keberatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam mekanisme akuntabilitas ADB. Untuk informasi lebih mengenai hal tersebut silakan lihat toolkit BIC mengenai kerangka kebijakan dan mekanisme akuntabilitas ADB.

Tahap 5: Pelaksanaan proyek

Proyek dilaksanakan oleh badan pelaksana dari sebuah negara berdasarkan jadwal dan prosedur yang sudah disepakati. Waktu pelaksanaan umumnya berkisar antara dua hingga lima tahun tergantung dari jenis dan sifat dari proyek tersebut.

Selama pelaksanaan proyek ADB bertanggung jawab untuk mengawasi proyek tersebut untuk memastikan peminjam mematuhi syarat-syarat yang ada pada perjanjian pinjaman dan kebijakan-kebijakan ADB. Badan pelaksana bertanggungjawab untuk memastikan proyek tersebut tidak menyebabkan kerusakan meluas terhadap lingkungan, atau membahayakan komunitas-komunitas di wilayah proyek tersebut. Jika ada dampak-dampak negatif yang tidak diperhitungkan dalam penilaian lingkungan dan sosial, peminjam harus merespon masalah-masalah tersebut dengan mengembangkan rencana-rencana untuk mengurangi dampak-dampak dan memberi penggantian kepada komunitas-komunitas yang mengalami kerugian.

Informasi apa yang tersedia: Sayangnya, ADB saat ini tidak membuka informasi apapun mengenai status dari pelaksanaan sebuah proyek.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil: Organisasi Masyarakat Sipil dapat mengawasi proyek-proyek untuk melihat apakah peminjam mengikuti semua komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian pinjaman, dan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko lingkungan dan sosial telah dilakukan. Seringkali peminjam akan tidak menepati komitmen-komitmen tersebut. Jika hal tersebut terjadi, Organisasi Masyarakat Sipil harus memberitahukan ADB, yang kemudian bisa mendorong peminjam untuk mematuhi komitmen-komitmen mereka. Jika ketidakpatuhan yang serius terjadi, Dewan ADB mempunyai kekuasaan untuk sementara menunda pencairan pinjaman, meskipun hal ini harus dilakukan sesuai

dengan perjanjian pinjaman, dan sangat jarang ADB akan benar-benar mengambil langkah tersebut. Tapi tidak ada salahnya untuk meminta atau membuat permintaan sejenis kepada ADB.

Ornop yang telah mengungkapkan kekhawatiran terhadap proyek-proyek ADB di masa lalu telah menemukan bahwa ADB mempunyai catatan yang buruk dalam hal pengawasan proyek-proyek sampai dengan pelaksanaannya. Ornop menghubungkan hal tersebut kepada beberapa faktor termasuk tendensi terhadap hadiah dan kenaikan jabatan staf ADB yang berdasarkan lebih pada jumlah pinjaman yang mereka bisa keluarkan dibandingkan dengan kualitas dari proyek-proyek tersebut, selain itu juga adanya salah persepsi mengenai pemenuhan tanggung jawab kebijakan-kebijakan ADB hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah peminjam seorang. Meskipun begitu, kebijakan ADB mengharuskan staf ADB untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dipatuhi, dan untuk membantu pemerintah peminjam untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut. Jika Organisasi Masyarakat Sipil merasa hal itu tidak terjadi, mereka harus mengajukan keberatan kepada pengambil keputusan ADB seperti, Dewan Direktur Eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan juga direktur jenderal dari departemen regional yang relevan.

Jika selama pelaksanaan Organisasi Masyarakat Sipil masih khawatir terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut, dan merasa bahwa kekhawatiran mereka tidak ditanggapi dengan baik oleh ADB, keberatan bisa diajukan pada mekanisme akuntabilitas ADB.

Tahap 6: Penyelesaian/Evaluasi Proyek

Setelah sebuah proyek diselesaikan dan beroperasi, departemen operasional ADB bertanggungjawab untuk menyiapkan

laporan penyelesaian proyek (*Project Completion Report - PCR*) untuk mendokumentasikan pengalaman pelaksanaan dalam jangka waktu 12 -14 bulan setelah penyelesaian proyek.

Departemen evaluasi kegiatan ADB (*Operations Evaluation Department - OED*) mengevaluasi rumusan dan pelaksanaan dari proyek-proyek secara selektif dan menyiapkan sejumlah laporan sektoral dan tematis, termasuk laporan audit kinerja proyek (PPAR) yang berisi penilaian dari rumusan dan pelaksanaan proyek, keuntungan ekonomis, keuangan dan sosial, dan dampak lingkungan. Laporan-laporan itu biasanya diselesaikan tiga tahun setelah penyelesaian dari pelaksanaan proyek atau sekitar dua tahun setelah PCR diedarkan pada Dewan ADB.

Informasi apa yang tersedia: Laporan penyelesaian proyek tersedia satu hingga dua tahun setelah penyelesaian proyek. Laporan itu dapat dilihat di <http://www.adb.org/Projects/reports.asp> atau dapat diminta melalui unit publikasi ADB. PPAR dan evaluasi OED lainnya seperti penilaian dampak dan kajian evaluasi khusus, kajian evaluasi ulang, dan evaluasi program bantuan negara juga tersedia di situs <http://www.adb.org/Evaluation/reports.asp> atau melalui unit publikasi.

Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil: Organisasi-organisasi yang berminat dapat memberikan masukan pada persiapan PCR dengan menghubungi departemen regional ADB yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut dan PPAR dan evaluasi lainnya dengan menghubungi OED ADB. OED menyiapkan dan menerbitkan rencana kerja tahunannya pada situs ADB di http://www.adb.org/Evaluation/work_prog.asp

Catatan:

¹ Pinjaman program ADF mempunyai masa jatuh tempo 24 tahun

² Untuk deskripsi yang lebih rinci dari dokumen-dokumen yang disebutkan dalam toolkit ini silakan lihat toolkit Bagaimana mengakses informasi dari ADB.